

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung.
- Adjie, Habib, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Andasasmita, Komar, 1984, *Notaris I*, Sumur, Bandung.
- Darus, M. Luthfan Hadi, 2017, *Hukum Notaris dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII press, Yogyakarta.
- Erlies Septiana Nurbani dan Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Buku Pertama*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Erwin, Muhammad dan Amrullah Arpan, 2008, *Mencari Hakikat Hukum Filsafat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Fajar Mukti ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- HS Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta)*, UII Press, Cetakan Kedua, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Kie, Thong Tan, 2000, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, Buku 1, Cetakan ke-2, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta.

- Lotulung, Paulus Effendi, *Perlindungan Hukum bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, Bandung, 2003
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-6, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Rosdakarya, Bandung.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Nico, 2003, *Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta.
- Nisya Rifiani, dan Hartanti Sulihandari, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Notodisoerjo, Raden Soegondo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurita, Emma, *Cyber Notary*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Putri A R, 2011, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris*, Cetakan Pertama, Sofmedia, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2003, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Salim H.S., 2008, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio, J, 1993, *Parate Eksekusi sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sugiyono, Bambang, 2011, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Afabeta, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketiga, Bandung

Waluyo, Bambang1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Cetakan pertama, Jakarta.

Yulianto Ahmad dan Mukti Fajar ND, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

**B. Website**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019, Sebaran Notaris di Wilayah Yogyakarta <http://siemon.kemenkumham.go.id/> diakses tanggal 25 maret 2019.

**C. Peraturan dan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas.